BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan tentang prosedur penyusunan anggaran belanja barang di Balai Besar Tekstil Bandung, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penyusunan anggaran belanja barang yang dilakukan di Balai Besar Tekstil Bandung, telah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Nomor : PER- 66 /PB/2005 , Balai Besar Tekstil menjalankan mekanisme pengeluaran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanaan sertifikasi bagi pejabat pembuat komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, dipandang perlu mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi pejabat pembuat komitmen dan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah.

4.2 Saran

Setelah menarik kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan yang bersangkutan, khususnya pada departemen keuangan dan anggaran sebagai penaggulangan masalah yang dihadapi, adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Dalam penyusunan anggaran belanja barang pada Balai Besar Tekstil sebaiknya melakukan koordinasi yang terarah dalam setiap unit atau departemen agar informasi dapat diperoleh dengan cepat dan seakurat mungkin.
2. Bahwa untuk meningkatkan transparasi dan kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengumuman dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah.